

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar modal merupakan sarana untuk mempertemukan pihak yang membutuhkan modal sebagai sumber pembiayaan (*issuer*) dan sarana investasi bagi pihak yang memiliki kelebihan modal. Secara faktual, pasar modal telah menjadi *financial nerve centre* (saraf finansial dunia) pada dunia ekonomi modern dewasa ini, bahkan perekonomian modern dikatakan tidak mungkin bisa eksis tanpa adanya pasar modal yang tangguh dan berdaya saing global serta terorganisir dengan baik.

Namun, sayangnya praktik pasar modal yang dilakukan secara konvensional di Indonesia justru menjadi wadah ekonomi yang paling banyak menjalankan transaksi yang dilarang dalam prinsip Islam, seperti bunga (*riba*), perjudian, *gharar*, penipuan, dan lainnya. Sedangkan dilihat dari prinsip syariah Islam, pasar modal adalah salah satu produk muamalah. Transaksi di dalam pasar modal menurut prinsip hukum syariah tidak dilarang atau dibolehkan sepanjang tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan/prinsip Islam. Hal itulah yang kemudian melatarbelakangi diupayakan dan dikembangkannya pasar modal syariah.

Pasar modal syariah pada saat ini menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hal ini terlihat dari nilai kapitalisasi pasar saham-saham syariah yang masuk dalam daftar Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) hingga akhir Oktober 2013, mencapai Rp 2.618 triliun. Nilai tersebut mempresentasikan

sebesar 58,4 % dari total nilai kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia, yaitu Rp 4,485 triliun.¹ Selain itu, disebutkan juga dalam harian *vivanews* bahwa *Index return* IHSG dalam periode itu sebesar 13%, LQ 45 sebesar 6%, sedangkan Indonesia Shariah Stock Index mencapai 19%.²

Perkembangan pasar modal syariah yang begitu cepat membuat perusahaan-perusahaan diekspektasikan untuk menyajikan laporan yang menunjukkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Hal itu dikarenakan pengambilan keputusan keuangan untuk kegiatan investasi akan sangat dipengaruhi oleh informasi yang didapat oleh investor. Dengan adanya informasi yang lengkap, akurat, relevan, dan tepat waktu, maka akan memungkinkan para investor dapat melakukan pengambilan keputusan secara rasional.

Kebanyakan investor dalam menentukan investasinya hanya melihat dan mempertimbangkan informasi keuangannya saja. Namun, saat ini informasi-informasi keuangan tidak lagi menjadi sumber utama yang dapat memenuhi kepentingan publik. Angka-angka keuangan tidak lagi relevan untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan jangka panjang. Hal itu dikarenakan beberapa tahun silam muncul kasus penyelewengan laporan keuangan oleh beberapa perusahaan. Seperti kasus yang menimpa beberapa grup terbuka Bakrie. Dalam laporan keuangan kuartal pertama tahun 2010, disebutkan bahwa beberapa perusahaan terbuka Bakrie mempunyai dana deposito sekitar Rp 6,8 triliun di

¹ Kontribusi Pasar Saham Syariah Makin Besar.

http://www.indonesiainancetoday.com/read/53635/Kontribusi-Pasar-Saham-Syariah_makin-Besar. (diakses pada 28 Februari 2014)

² *Ibid.*

Bank Capital Indonesia. Padahal seluruh dana nasabah di bank swasta ini hanya Rp 2,7 triliun.³

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan dianggap memiliki informasi yang bias dan disangsikan keakuntabilitasnya. Hal itu dikarenakan terdapat keterbatasan informasi di dalamnya. Atas dasar itulah, saat ini investor dan calon investor juga membutuhkan laporan non keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kegiatan investasinya. Salah satu laporan non keuangan yang mendapat banyak perhatian para investor dan calon investor adalah laporan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Tuntutan publik atas penerapan prinsip-prinsip CSR terhadap proses bisnis yang dijalankan oleh perusahaan semakin meningkat. Tidak dapat dipungkiri, bahwa kegiatan bisnis tidak hanya telah membawa perubahan yang begitu besar dalam perekonomian, tetapi juga memunculkan dampak eksternal terhadap lingkungan sekitar dan sosial kemasyarakatan yang cukup besar. Isu mengenai kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan sumber daya alam yang semakin menipis memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses bisnis perusahaan. Hal ini menjadikan proses bisnis yang dijalankan yang melibatkan aktivitas yang berhubungan dengan sosial, lingkungan, dan tata kelola semakin dibutuhkan publik untuk menilai kinerja perusahaan secara menyeluruh dalam jangka panjang. Menghadapai kebutuhan tersebut, maka setiap perusahaan sangatlah

³Kisruh laporan Grup Bakrie. <http://www.indoensiamedia.com/2010/07/25/kisruh-laporan-grup-bakrie/>, (diakses pada 28 Februari 2014)

dituntut untuk menerapkan dan menyampaikan informasi-informasi non keuangan tersebut dalam laporan CSR atau *sustainability* perusahaan.

Pelaksanaan dan pengungkapan CSR ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007. Undang-Undang ini mewajibkan perseroan serta semua perusahaan yang terdaftar di pasar modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta melaporkannya. Salah satu media yang dapat digunakan untuk mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan perusahaan adalah melalui laporan tahunan (*annual report*) perusahaan yang diterbitkan oleh perusahaan. Hal itu selaras dengan (PSAK) No.1 tahun 2004 tentang Penyajian laporan Keuangan dan dalam *Exposure Draft PSAK no 20 tahun 2005 tentang Akuntansi Lingkungan*. Disebutkan dalam Draft PSAK tersebut bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial diperlukan agar merefleksikan secara penuh berbagai dampak lingkungan yang timbul dari berbagai aktivitas operasi perusahaan.

Meskipun sudah ditegaskan dalam Undang-Undang, namun pada praktiknya belum semua perusahaan memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Berdasarkan hasil penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dalam pengelolaan lingkungan hidup 2012-2013, diketahui bahwa terdapat penurunan tingkat ketaatan perusahaan dalam menjalankan program CSR dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 ini, perusahaan yang menjalankan dan melaporkan kegiatan CSRnya turun 4% dari

tahun sebelumnya, yaitu dari 69% (2012) menjadi 65% (2013).⁴ Selain itu masih terdapat 628 perusahaan yang mendapat peringkat merah dan hitam. Sedangkan yang mampu meraih peringkat emas hanya 12 dari 1812 perusahaan.⁵

Peringkat merah diberikan apabila pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan apabila perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup atau telah melakukan upaya pengelolannya, namun belum mencapai persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan penyimpangan material maka perusahaan tersebut dikategorikan pada peringkat hitam. Dan peringkat terbaik atau peringkat emas diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan baik dan hasil yang maksimal.⁶

Tingkat pengungkapan dan pelaporan CSR pada perusahaan pun sangat beragam dan belum terstandarisasi. Hal ini ditegaskan oleh guru besar ilmu akuntansi FE UI, Utama. Beliau mengungkapkan bahwa saat ini tingkat pelaporan dan pengungkapan CSR di Indonesia masih relatif rendah. Selain itu, apa yang dilaporkan dan diungkapkan sangat beragam, sehingga menyulitkan pembaca laporan tahunan untuk melakukan evaluasi.⁷

⁴Hasil penilaian PROPER klh 2013. <http://www.menlh.go.id/hasil-penilaian-proper-klh-2013/>, diakses pada 4 Maret 2014

⁵Ibid.

⁶... <http://proper.menlh.go.id/proper%20baru/html/menu%201/intro.htm>, diakses pada 4 maret 2014

⁷... <http://www.ui.ac.id/news/archive/410>, diakses ada 25 februari 2014.

Hingga saat ini, pelaksanaan dan pengungkapan CSR belum dapat dipenuhi oleh semua perusahaan, terutama perusahaan yang masih berskala kecil. Februari 2013 lalu dalam *Media News*, menteri ESDM menyatakan meski selama ini perusahaan tambang besar sudah tertib menyisihkan keuntungan untuk dana CSR dan lingkungan, namun masih perlu untuk dilipatgandakan alokasi dananya. Sementara itu, perusahaan tambang kecil masih banyak yang belum menyisihkan dana CSR dan lingkungannya.⁸

Berita tersebut diperkuat oleh Jalal, Aktivistis dari Lingkaran Studi CSR dalam *detik.com*. Beliau mengungkapkan bahwa perusahaan tambang di Indonesia kebanyakan adalah perusahaan kecil dan sedang. Namun, kepedulian mereka terhadap lingkungan khususnya dalam menjalankan program CSR sangat rendah. Hal itu dikarenakan masih minimnya kesadaran para pelaku usaha tambang yang masih berskala kecil tersebut. Mereka cenderung beranggapan bahwa pengalokasian dana CSR merupakan sebuah pemborosan biaya perusahaan.⁹

Diungkapkan juga bahwa perusahaan tambang kecil beroperasinya dalam jangka pendek, mengeruk sumber daya dan langsung pergi mencari tempat pertambangan lain. Berbeda dengan perusahaan pertambangan besar yang memiliki investasi besar dan dalam jumlah besar. Mereka membutuhkan dukungan masyarakat untuk tetap beroperasi dalam jangka panjang.¹⁰

⁸Retno Ayuningtyas. Perusahaan tambangan diminta tingkatkan dana CSR. <http://www.ima-api.com/index.php?option=com/content&view=article&id=735:perusahaan-tambang-diminta-tingkatkan-dana-csr&catid=47:media-news&itemid=98&lang=id> (diakses pada 5 Maret 2014)

⁹... ribuan perusahaan tambang di RI, hanya 10 yang jalankan CSR. <http://finance.detik.com/read/2012/07/14/154959/1965426/4/ribuan-perusahaan-tambang-di-ri-hanya-10-yang-jalankan-csr> (diakses pada 5 Maret 2014)

¹⁰*ibid.*

Beberapa fakta tersebut memperlihatkan bahwa perbedaan ukuran perusahaan akan mempengaruhi kesadaran perusahaan untuk menjalankan serta melaporkan kegiatan CSRnya. Perusahaan kecil memiliki kesadaran yang masih minim terkait pentingnya pelaksanaan dan pelaporan kegiatan CSR dibanding dengan perusahaan berskala besar. Hal ini dikarenakan banyak perusahaan kecil yang menganggap alokasi dana CSR sebagai beban perusahaan yang tidak mendatangkan timbal balik keuntungan dalam waktu dekat.

Selain ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan juga menjadi salah satu penyebab perbedaan tingkat alokasi dana CSR beserta pelaporannya. Profitabilitas itu sendiri merupakan rasio yang berfungsi untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Kepala Badan Lingkungan Hidup Sumatra Utara, Hayati menyatakan,

“Dari sekitar 1600 perusahaan yang ada di Sumatera Utara, hanya 200 perusahaan yang menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat. Perusahaan yang belum melakukan program CSR ini rata-rata merupakan perusahaan yang memiliki rasio profitabilitas kecil.”¹¹

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba menjadi masalah dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan CSR perusahaan. Hal itu dikarenakan perusahaan dengan tingkat profitabilitas kecil masih melihat CSR hanya sebagai pengeluaran biaya atau beban perusahaan yang akan semakin memperkecil laba pada laporan keuangan.

¹¹... Dari 1600 perusahaan di SUMUT hanya 200 yang jalankan CSR.
<http://energitoday.com/2012/10/09/dari-1600-perusahaan-di-sumut-hanya-200-yang-jalankan-csr/> (diakses pada 3 Maret 2014)

Dalam penelitiannya, Agus Purwanti menyatakan dari 48 perusahaan yang termasuk ke dalam klasifikasi *high profile*, terdapat 21 perusahaan yang melakukan pengungkapan kegiatan CSR sangat baik. Sedangkan dari 45 perusahaan kategori *low profile*, hanya terdapat 7 perusahaan yang mengungkapkan CSR-nya dengan baik. Perusahaan yang digolongkan ke dalam kategori *high profile* umumnya memiliki karakteristik seperti memiliki jumlah tenaga kerja yang besar dan dalam proses produksinya mengeluarkan residu, seperti limbah dan polusi. Meskipun pengaruh terhadap lingkungan pada perusahaan *high profile* lebih besar, namun seharusnya perusahaan *low profile*, seperti perusahaan perbankan, telekomunikasi, dan jasa lainnya tetap harus menyajikan laporan pelaksanaan CSR dengan baik.

Pedoman pelaporan CSR yang paling banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan di seluruh dunia adalah *Sustainability Reporting Guidelines* yang lebih dikenal dengan Kerangka Pelaporan Global Reporting Initiative (GRI). Di Indonesia sendiri, promosi dan penyebaran pedoman GRI telah dilakukan oleh NCSR (*National Center for Sustainability Reporting*) sejak tahun 2005. Namun, pada tahun 2005 hanya terdapat 1 perusahaan di Indonesia yang menerbitkan laporan ini. Dan hingga tahun 2011 kemarin hanya ada sekitar 30 perusahaan yang akan mempublikasikan laporan CSR/*sustainability report*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang mempengaruhi tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan sebagai berikut,

1. Masih banyak perusahaan kecil yang enggan melakukan kegiatan CSR dan pelaporannya.
2. Masih rendahnya kepedulian dan kesadaran perusahaan akan pentingnya kegiatan CSR dan pelaporannya.
3. Rendahnya tingkat profitabilitas perusahaan mengakibatkan perusahaan enggan melakukan kegiatan CSR dan membuat pengungkapannya.
4. Tipe industri *non ekstraktif* atau *low profile* yang kurang peduli dengan lingkungan.
5. Belum terstandarisasinya pengungkapan dan pelaporan CSR pada perusahaan-perusahaan di Indonesia.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset perusahaan dan profitabilitas yang diukur dengan rasio *Return on Equity* (ROE) terhadap tingkat pengungkapan CSR yang diukur dengan menggunakan metode *content analysis* atas indeks GRI pada perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah. Maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah “Hubungan antara ukuran perusahaan dan profitabilitas dengan tingkat pengungkapan CSR.”

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut,

1. Apakah terdapat hubungan antara ukuran perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah?
2. Apakah terdapat hubungan antara tingkat profitabilitas perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah?
3. Apakah terdapat hubungan antara tingkat profitabilitas dan ukuran perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah.

E. Kegunaan Penelitian.

Adapun kegunaan penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut,

1. Manfaat Teoritis

Memberikan informasi yang berguna untuk pengembangan penelitian terkait tingkat pengungkapan CSR pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan masukan untuk membantu pihak manajemen perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah

untuk meningkatkan penyusunan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan para investor maupun calon investor untuk mengetahui dan mengukur kinerja sosial perusahaan.